KLIPING BERITA MEDIA MASSA

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal. 16	3 Januari 2019	Dari Normalisasi, Sudetan Hingga Waduk	Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97 titik, DKI Jakarta 97 titik, dan Banten 9 titik.
2	Bisnis Indonesia, Hal. 16	3 Januari 2019	TOD Lebih Dipilih Ketimbang Pinggir Tol	Pembangunan infrastruktur membuka peluang bagi pengembang untuk membangun kompleks property yang berdekatan dengan proek prasarana itu
3	Kompas, Hal 1	3 Januari 2019	Pertegas Kebijakan Atasi Bencana	Banjir dan longsor masih menjadi potensi terjadi. Perlu upaya antisiasi semua pihak dan kebijakan menyeluruh guna mengatasi bencana berulang
4	Kompas, Hal 10	3 Januari 2019	Gagal Atasi Banjir	Bencana banjir terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrem, lingkungan rusak dan buruknya tata kelola untuk mengatasi banjir turut memicu banjir besar
5	Tempo, Hal 1	3 Januari 2019	Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak Negatif Alih Fungsi Hutan	Mahkamah Agung mencabut PP No. 104 tahun 2015 yang mengatur alih fungsi kawasan hutan

Judul	**Dari Normalisasi, Sudetan Hingga Waduk**	Tanggal	3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 16		
Resume	Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97 titik, DKI Jakarta 97 titik, dan Banten 9 titik.		

ATASI BANJIR JAKARTA

Dari Normalisasi, Sudetan Hingga Waduk

Menyedihkan, sebagian besar warga Jakarta dan sekitarnya harus menyakan Tahun Baru 2020 dalam genangan air. Bahkan, tagar #Banjir2020 menjadi tren atau paling banyak menghiasi media sosial Twitter pada hari kedua tahun Tikus Logam ini.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Agus Wibowo mengatakan, titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 97 titik, DKI Jakarta 63 titik, dan Banten 9 titik.

"DKI Jakarta mempunyai 63 titik dengan rincian Jakarta Barat tujuh titik, Jakarta Pusat dua titik, Jakarta Selatan 39 titik, Jakarta Timur 13 titik, dan Jakarta Utara 2 titik," katanya, pada Rabu (1/1).

Pemetaan penyebab banjir pun sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga terkait hingga Pemerintah Daerah.

Curah hujan di atas 100 mm/hari atau masuk dalam kategori Hujan Sangat Lebat yang terjadi di penghujung 2019, dituding menjadi penyebab utama banjir pada awal tahun ini.

Pasalnya, hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, guyuran hujan pada 31 Desember 2019 di Pos Curah Hujan Halim dan Cakung tercatat lebih dari 300 milimeter dan menyebabkan debit Sungai Ciliwung sebesar 500 m3/detik dan Sungai Sunter sebesar 100 m3/detik.

Namun, lambatnya pembangunan prasarana pengendali banjir juga tidak ditampik sebagai penyebab lain dari musibah ini.

Kepada *Bisnis*, pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyampaikan banjir besar juga terjadi karena buruknya sistem saluran air dan drainase di Jakarta. Menurutnya, saluran air yang ada saat ini tidak memadai untuk menampung banyak air.

"Banjir ini penyebabnya kombinasi antara hujan lokal, saluran air tidak berfungsi optimal, dan minimnya daerah resapan air. Banjir kiriman dari Puncak dan Bogor juga memperparah kondisi di Jakarta," ucapnya.

Selain itu, Joga menambahkan bahwa tanggul jebol juga menjadi penyebab terjadinya banjir dan bahkan berpotensi memakan korban jiwa. Menurutnya, mitigasi harus dilakukan yakni melalui pengecekan secara berkala kondisi tanggul.

"Tanggul harus dicek secara berkala sehingga jika terjadi keretakan atau bocor bisa langsung segera diperbaiki sebelum jebol. Kalau dipelihara dengan baik tanggul dapat berfungsi optimal," imbuhnya.

BANYAK PIHAK

Untuk mengentaskan masalah banjir, harus melibatkan banyak pihak. Gotong royong dan sinergi dari pihak-pihak seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Daerah, BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), harus dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam mengentaskan banjir di Indonesia, khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai salah satu penyebab banjir pada awal tahun ini karena progres normalisasi empat sungai yakni Ciliwung, Krukut, Cakung, dan Sunter yang terhenti sejak 2017 yang terkendala pembebasan lahan.

Menteri Basuki pun menyampaikan akan terus bersinergi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guna menuntaskan pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang terhenti di 16 kilometer dari target 33 kilometer itu.

"Nanti saya dengan Gubernur [Anies Baswedan] akan diskusikan untuk menyelesaikan program itu [normalisasi sungai]," ujarnya usai meninjau kondisi banjir di Jakarta, Rabu (1/1).

Pada keempat sungai tersebut, Kementerian PUPR dan semua pihak terkait lainnya akan terus melakukan upaya pengendalian banjir.

Pertama, program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah di atas 90% dan progres fisik saat ini mendekati 45% yang berada di hulu Sungai Ciliwung.

Kedua, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta pada 26 Desember 2019.

Masyarakat setempat pun telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.

Ketiga, untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi di mana pada 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

Kendati Gubernur Anies Baswedan menitikberatkan solusi banjir Jakarta terletak pada pengendalian air di hulu - melalui pembangunan waduk Sukamahi dan Ciawi - dan bukan sekadar pada normalisasi sungai, dia sepakat untuk bersama pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

"Kita bersyukur Kementerian PUPR sedang menyelesaikan pembangunan dua bendungan itu. Namun dalam fase ini yang penting saat ini warga selamat dan penanganan juga cepat, lalu nanti kita duduk bersama dan memastikan bahwa masterplan penyelesaian masalah banjir ini sinkron," katanya.

DEAL BISNIS
TANAH DIJUAL

Judul	**TOD Lebih Dipilih Ketimbang Pinggir Tol**	Tanggal	3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 16		
Resume	Pembangunan infrastruktur membuka peluang bagi pengembang untuk membangun kompleks property yang berdekatan dengan proek prasarana itu		

TOD Lebih Dipilih Ketimbang Pinggir Tol

Masifnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi massal modern, membuka peluang bagi pengembang untuk membangun kompleks properti yang berdekatan dengan proyek prasarana itu.

» Lokasi yang paling prospektif untuk disasar menjadi hunian saat ini dengan infrastruktur jalan tol dan kendaraan umum yang sudah memadai antara lain berada di Tangerang, Depok, Sentul, Bekasi, hingga Cikarang.

Judul	**Pertegas Kebijakan Atasi Bencana**	Tanggal	3 Januari 2019
Media	Kompas, Hal 1		
Resume	Banjir dan longsor masih menjadi potensi terjadi. Perlu upaya antisiasi semua pihak dan kebijakan menyeluruh guna mengatasi bencana berulang		

Pertegas Kebijakan Atasi Bencana

Cuaca buruk diprediksi akan berlangsung dalam sepekan ke depan. Banjir dan longsor diprediksi bisa terjadi lagi. Perlu upaya antisipasi dini semua pihak dan kebijakan menyeluruh guna mengatasi bencana berulang.

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah di wilayah Jabodetabek untuk mengatasi banjir melemah selama beberapa tahun terakhir. Banjir kali ini menjadi peringatan untuk segera memperkuat kebijakan dan meningkatkan koordinasi antardaerah di tengah tingginya potensi hujan ekstrem.

Banjir di DKI Jakarta pada dua hari terakhir terjadi karena tiga faktor, yaitu curah hujan lokal ekstrem, air laut pasang, dan banjir kiriman dari hulu. Banjir yang memaksa 31.232 jiwa di Jakarta mengungsi dan 22 orang tewas di Jabodetabek ini menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur pemerintah dalam mengatasi banjir.

Menurut data curah hujan dan ketinggian muka air di pintu air, banjir yang terjadi pada Rabu (1/1/2020) pagi diakibatkan hujan lokal di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang sendiri, bukan banjir kiriman dari hulu. Tinggi muka air di Pintu Air Manggarai sudah memasuki status Siaga 2 pada Rabu sekitar pukul 03.00, dan Pintu Air Pasar Depok baru memasuki Siaga 2 sekitar pukul 09.00 saat ketinggian air di Manggarai sudah tinggi.

Sementara Pintu Air Katulampa di Kabupaten Bogor baru memasuki Siaga 2 pada pukul 09.00. Artinya, ketinggian air di Jakarta sudah tinggi, sementara air kiriman dari hulu belum datang.

>> BACA JUGA:

Siaga Cegah Banjir

Pemerintah semestinya memilih solusi menyeluruh agar persoalan banjir di Ibu Kota bisa diselesaikan dengan baik. KOMPAS.ID

klik.kompas.id/siagabanjir

BACA JUGA HLM 2, 17 DAN 18

Empat sungai meluap, yaitu Ciliwung, Cakung, Krukut, dan Kali Sunter. Demikian juga saluran-saluran air sehingga belasan ruas jalan vital terendam hingga mengganggu transportasi. Kondisi ini menunjukkan daya tampung sungai-sungai dan saluran air Jakarta tidak memadai dalam menghadapi curah hujan ekstrem, bahkan tanpa diperparah banjir kiriman sekalipun.

Presiden Joko Widodo meminta penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah dilakukan secara bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat juga perlu saling membantu, baik dalam menolong korban bencana maupun menjaga lingkungan.

Banjir yang melanda pada awal tahun ini bukan hanya disebabkan kerusakan ekosistem. Namun, faktor lain adalah perilaku sering membuang sampah di mana-mana. Karena itu, semua faktor ini harus ditangani secara bersama.

"Ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini. Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tetapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal," kata Presiden di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2019).

Kerja sama lintas pemerintahan juga diperlukan agar semua aspek penanganan bencana ini bisa dilakukan dengan baik. Kendati demikian, fokus utama saat ini tetap evakuasi korban banjir.

Setelah korban tertangani, pemerintah mempersiapkan infrastruktur untuk mengantisipasi banjir ke depan. "Tetapi, yang paling penting, pada saat kejadian sekarang ini, adalah

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-2)

Jabodetabek melambat

Untuk Jabodetabek, kebijakan mengantisipasi banjir belum ada yang tuntas dikerjakan. Di kawasan hulu, perbaikan kawasan resapan air dan mengembalikan atau mengganti situ-situ yang hilang di Depok belum juga terlihat hasilnya.

"Ini cerita lama yang belum teratasi. Daerah aliran sungai dan resapan di Kabupaten Bogor dan Depok mengalami alih fungsi sehingga rusak. Situ-situ di Depok banyak yang sudah hilang. Langkah penertiban dan membuat daerah resapan pengganti belum terlaksana," kata Ketua Harian Forum DAS Nasional Chay Asdak.

Di Jakarta, pelebaran kali yang lazim disebut normalisasi Ciliwung terhenti selama dua tahun, yaitu 2017-2018. Penyebabnya, tidak ada pembebasan lahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tidak bisa melanjutkan pelebaran dan penataan bantaran kali selama dua tahun tersebut.

Tahun 2019, pengerjaan pe-

Untuk Kali Ciliwung, lebar ideal adalah 40-50 meter dengan lebar sempadan sungai 15 meter di dua sisi. Namun, kenyataannya, di alur sungai yang belum tersentuh penataan, lebarnya rata-rata hanya 17,5 meter. Sempadan pun penuh dengan permukiman warga.

Bambang mengatakan, sepanjang 16 km Ciliwung yang sudah dinormalisasi, hampir seluruhnya sudah bebas banjir. Sebagian kecil saja masih meluap karena belum tuntasnya normalisasi dan di beberapa titik ada bolong-bolong.

Chay menambahkan, Jakarta perlu segera menambah daya tampung air, baik dengan membangun danau dan waduk maupun penataan sungai dan bantaran tanpa lagi membenturkan konsep naturalisasi dengan normalisasi. Namun, Jakarta tak bisa sendiri. Semua pemerintah daerah di area Jabodetabek dan pemerintah pusat harus bekerja sama dalam mengantisipasi banjir.

(IRE/SYA/DIT/ZAK/JOG/DEA/HLN/INA/NTA/INK/FAI/DIV/AYU/DAN/ERK)

Judul	**Gagal Atasi Banjir**	Tanggal	3 Januari 2019
Media	Kompas, Hal 10		
Resume	Bencana banjir terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrem, lingkungan rusak dan buruknya tata kelola untuk mengatasi banjir turut memicu banjir besar		

Gagal Atasi Banjir

Bencana banjir terus terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Selain cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola untuk mengatasi banjir turut memicu banjir besar.

Banjir bukan peristiwa baru di Jakarta. Sejak Jan Pieterszoon Coen membangun kota ini di muara Sungai Ciliwung pada 1619, banjir berulang kali melanda. Meski berbagai upaya dilakukan, banjir Jakarta terus terjadi.

Hanya tiga tahun sejak dibangun, pada 1621, Batavia, nama lama Jakarta, kebanjiran. Banjir juga terjadi pada 1654 yang menyebabkan kota tua Jakarta ditinggalkan. Perlahan, pertumbuhan kota mengarah ke selatan.

Menurut Restu Gunawan, sejarawan yang meneliti riwayat banjir Jakarta, dalam bukunya, *Gagalnya Sistem Kanal* (2010), akhir abad ke-18, ada perpindahan besar-besaran warga Batavia ke daerah lebih tinggi di selatan, yaitu Weltevreden. Jadi, Weltevreden yang semula hutan dan rawa-rawa berkembang pesat. Apalagi pada 1807, Herman Willem Daendels menjadikan Weltevreden sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda di Asia.

Namun, banjir tak beranjak pergi, tetapi kian menjadi karena okupasi area resapan di utara. Pada 1 Januari 1892, Weltevreden kebanjiran. Seperti ditulis koran *Siang Po*, banjir terjadi setelah turun hujan lebat delapan jam dengan curah hujan tertinggi 286 milimeter per hari. Setahun kemudian, banjir lebih besar melanda. Hampir seluruh kota terendam.

Batavia kembali banjir pada 1895, 1899, 1904, dan 1909. Pemerintah kolonial dinilai gagal mengatasi banjir. Pada 19 Februari 1909, koran *de Locomotief* menulis berita berjudul "Batavia Onder Water", pelesetan dari singkatan BOW (Burgerlijke Openbare Werken), kantor yang menangani sarana dan prasarana pemerintah, termasuk pengairan.

Sebaran Hujan Jabodetabek

Wilayah Jabodetabek umumnya hujan sedang hingga ekstrem. Konsentrasi hujan merata di seluruh wilayah Jabodetabek. **Curah hujan harian tinggi terukur di Bandara Halim Perdanakusuma yaitu 377 milimeter.**

Peta Sebaran Hujan Jabodetabek

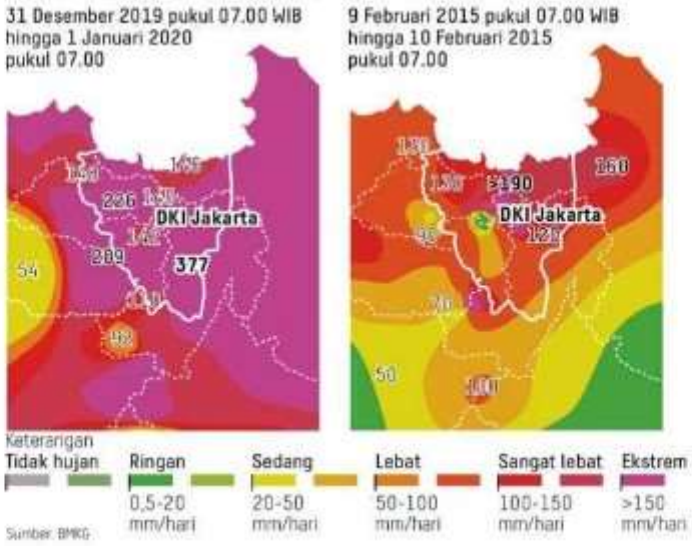

Kejadian Banjir Besar dari Curah Hujan BMKG Kemayoran

INFOGRAFIK: HANS

Pada Januari 1918, Batavia dilanda banjir hebat sehingga melumpuhkan aktivitas kota ini sebulan. Banjir terus berulang di Batavia, hingga nama kota berubah menjadi Jakarta dan menjadi ibu kota Indonesia.

Berganti-ganti penguasa, dengan janji politik mengatasi banjir Jakarta, jadi pepesan kosong. Penelusuran di Pusat Informasi *Kompas* menemukan, hampir tiap tahun ada berita banjir Jakarta. Sejak 1965 sampai awal 2000, ada 17.192 artikel banjir Jakarta.

Pemicu awal

Hujan lebat menjadi pemicu awal banjir Jakarta. Analisis BMKG menunjukkan, beberapa kejadian banjir besar di Jakarta pada masa lalu, misalnya pada 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, dan 2015, dapat dikaitkan dengnan curah hujan ekstrem dan fenomena meteorologis membentuknya.

Menurut Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab, banjir di Jakarta dan sekitarnya kali ini disebabkan curah hujan ekstrem, di atas 150 mm per hari, merata. Bahkan, curah hujan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 377 mm per hari jadi rekor tertinggi dalam 154 tahun terakhir.

Anomali curah hujan tinggi ini dipengaruhi penguatan aliran monsun Asia dan indikasi jalur area konvergensi massa udara atau pertemuan angin monsun intertropis (ITCZ) di atas Jawa bagian utara. ITCZ memicu pertumbuhan awan amat cepat, tebal, dan masif akibat penguapan dari lautan sekitar Jawa yang menghangat dan memasok kelimpahan massa uap air bagi atmosfer.

Kajian Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto menunjukkan kesesuaian tren kian seringnya banjir di Jakarta dan kenaikan intensitas hujan maksimum per tahun menurut data curah hujan harian 150 tahun (1866-2015). Di Jabodetabek, curah hujan harian tertinggi naik 10-20 mm tiap 10 tahun.

Namun, aspek cuaca ini tak bisa jadi pembenar bagi banjir Jakarta dan sekitarnya yang menelan sedikitnya 30 korban jiwa. Penyebab banjir di Jakarta tak hanya krisis iklim, tetapi juga krisis ekologi dan sosial berupa besarnya limpasan air dari area hulu antara lain karena rusaknya tutupan vegetasi, berkurangnya danau tempat penyimpanan air, mendangkalnya sungai akibat sedimentasi dan sampah, serta penurunan daratan akibat disedotnya air tanah.

Berbagai penyebab ini lama diketahui. Solusi krisis iklim tak mudah diatasi karena bersifat global, tetapi krisis ekologi dan sosial seharusnya bisa diatasi. (AHMAD ARIF)

Judul	**Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak Negatif Alih Fungsi Hutan**	Tanggal	3 Januari 2019
Media	Tempo, Hal 1		
Resume	Mahkamah Agung mencabut PP No. 104 tahun 2015 yang mengatur alih fungsi kawasan hutan		

NASIONAL

Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak Negatif Alih Fungsi Hutan

Mahkamah Agung mencabut PP No. 104 Tahun 2015 yang mengatur alih fungsi kawasan hutan.

EDISI, 3 JANUARI 2020

JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendukung putusan uji materi Mahkamah Agung yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Selama ini, aturan yang mengizinkan alih fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi menjadi perkebunan itu kerap dijadikan tameng oleh perusahaan untuk merambah hutan.

Direktur Komunikasi Yayasan Auriga Nusantara Syahrul Fitra menyebutkan bahwa aturan mengenai alih fungsi hutan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo melalui paket ekonomi dengan target mendorong investasi. Namun, kata dia, sejak awal penerbitannya, aturan itu menuai kritik dari para aktivis lingkungan. "Pengusaha nakal yang selama ini berinvestasi dengan mengabaikan prinsip-prinsip investasi yang baik dan berkelanjutan diuntungkan," kata Syahrul, kemarin.

Syahrul mengatakan banyak pengusaha nakal di sektor sawit yang merambah kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi untuk dijadikan kebun sawit. Padahal kawasan hutan tidak diperkenankan dikonversi menjadi perkebunan sawit. "Namun pemerintah bukannya melakukan penegakan hukum, justru melegalkan penguasaan tersebut melalui PP 104 Tahun 2015," ujar dia.

Pekan lalu, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai penggugat mempersoalkan pasal yang mengatur prosedur alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan. Pasal 51 PP No. 104 juga dipersoalkan lantaran menyatakan bahwa pemerintah melegalkan kawasan hutan yang telanjur dialihfungsikan menjadi kebun selama satu daur tanaman pokok.

Menurut Syahrul, praktik pelepasan kawasan hutan menjadi kebun sawit sering terjadi di Kalimantan Tengah dan Riau. Data yang diolah Auriga menemukan bahwa terdapat 115.694 hektare kawasan konservasi dan 174.910 hektare hutan lindung yang telah beralih fungsi menjadi kebun sawit.

BERITA TERKAIT

Pegiat Lingkungan Ungkap Dampak Negatif Alih Fungsi Hutan

Tiga Pengintai di Sekitar Rumah Novel Tak Diperiksa Lagi

Pasal Penjerat Tersangka Penyerang Novel Dinilai Janggal

Adapun jumlah keseluruhan kebun sawit yang berada di kawasan hutan mencapai 3,47 juta hektare, atau mencapai 20,2 persen dari keseluruhan kebun sawit yang seluas 16,8 juta hektare. Data Kementerian Pertanian mencatat luasan sawit terbesar berada di Riau dengan jumlah 3,38 juta hektare.

Auriga, yang bergerak di bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, juga menemukan sejumlah modus korporasi untuk mendapatkan amnesti melalui PP 104. Pertama, korporasi secara sengaja mengkonversi kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin. Tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Modus lainnya, perusahaan melakukan ekspansi perkebunan sawit melalui pembakaran lahan di kawasan hutan. Setelah lahan terbuka dan kebun berdiri, pemerintah menerbitkan izin dengan landasan PP No. 104. Syahrul mengatakan tak mengherankan jika hampir setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran lahan dan hutan.

Juru kampanye Greenpeace, Rio Rompas, mengatakan perambahan oleh korporasi berimplikasi pada kebakaran hutan seluas 1 juta hektare di hutan alam primer, hutan gambut, dan kawasan konservasi sepanjang 2015-2018. "Paling parah terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo. Di sana sudah dirambah habis-habisan untuk sawit," ucap dia.

Menurut Rio, perambahan dilakukan sejak lama oleh korporasi. Bahkan data World Wide Fund for Nature menemukan 70 persen dari 88 ribu hektare luas Taman Nasional Tesso Nilo telah dikuasai oleh korporasi sawit. Dia mengatakan pemerintah sama sekali tak melakukan penegakan hukum, tapi justru melegalkan pelanggaran hukum tersebut melalui PP No. 104.

Rio mendesak pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung dengan mencabut PP No. 104. Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan data ihwal konsesi kebun di kawasan hutan, sehingga penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap perusakan kawasan hutan.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi Boy Even Sembiring menyatakan alih fungsi kawasan hutan dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berujar, pada 2010 dan 2012, Presiden Yudhoyono juga menerbitkan aturan yang sama tentang alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan. "Peraturan pemerintah ini dibuat untuk memfasilitasi ketelanjuran, kebun-kebun di kawasan hutan dilegalkan," kata dia. **AVIT HIDAYAT**

Salin Rupa Hutan Menjadi Kebun Sawit

PEGIAT lingkungan mencatat sekitar 3,4 juta hektare perkebunan sawit berada di kawasan hutan. Fakta itu belakangan diduga dilegitimasi pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang isinya memutihkan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan. Lalu Mahkamah Agung membatalkan ketentuan ini atas gugatan uji materi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Berikut ini data perkebunan sawit dalam kawasan hutan.

Wilayah	Kebun Sawit	Kebun sawit dalam hutan
Sumatera Utara	2.079.027	330.714
Jambi	1.134.640	95.309
Riau	3.387.206	1.231.470
Sumatera Selatan	1.488.468	218.425
Kalimantan Barat	1.807.643	114.731
Kalimantan Tengah	1.778.702	984.544
Kalimantan Timur	1.287.449	107.788
Total luas sawit nasional	16.381.959	3.474.449

Kasus Perusakan Lingkungan

- Taman Nasional Tesso Nilo, Riau
  Sekitar 70 persen dari 88 ribu hektare luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dirambah oleh sejumlah perusahaan perkebunan sawit. Saat ini luas kawasan Tesso Nilo hanya tersisa 15 ribu hektare, padahal kawasan itu merupakan habitat terakhir gajah dan harimau.

- Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara
  Forum Konservasi Leuser menemukan sekitar 2.000 dari total 1,09 juta hektare kawasan taman nasional ini diubah menjadi kebun sawit secara ilegal. Tapi sawit-sawit itu kemudian ditebang untuk menyelamatkan taman nasional ini.

- Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah
  Jaringan Pemantau Independen Kehutanan menemukan ada dugaan perambahan hutan dan alih fungsi kawasan taman nasional menjadi perkebunan sawit. Mereka juga menemukan dugaan penebangan kayu secara ilegal seluas 568 ribu hektare di lokasi taman nasional.

AVIT HIDAYAT | ADHIKA NUSANTARA | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | KEMENTERIAN PERTANIAN